

BAB II

**TINJAUAN HUKUM SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR DAN UNI
EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**A. Tinjauan Hukum Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab
Terhadap Qatar dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional**

1. Perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional

Arab Saudi telah melakukan perjanjian rahasia antara Qatar dengan Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab pada tahun 2013 dan tahun 2014 dengan keberadaan dokumen perjanjian Qatar dan Bahrain, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang telah disepakati oleh kepala negara diketahui sebagian isinya, sebagiannya isinya masih dirahasiakan karena dianggap merupakan suatu perjanjian yang vital, hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat dikawasan Timur Tengah yang memiliki akses mengenai dokumen perjanjian tersebut, dokumen perjanjian tersebut dirilis pada tanggal 23 November 2013, dengan dokumen perjanjian utama yang ditandatangani oleh Raja Qatar, Raja Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dengan isi perjanjian yang menjabarkan komitmen negara – negara arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok – kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari

intervensi – intervensi urusan internal setiap negara. Perjanjian tersebut dinamakan dengan “ Kesepakatan Riyadh” yang menjelaskan secara khusus larangan mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir serta Teroris yang mengancam kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung media antagonis yang hal ini diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berada di Qatar, dengan tuduhan bahwa media tersebut telah mendukung kelompok Ikhwanul Muslim dan kelompok – kelompok Teroris yang berada dikawasan Timur Tengah khususnya yang berada di Bahrain dan Mesir, kemudian dokumen yang kedua yang dirilis pada tanggal 16 November 2014 yang diberi kop *Top Secret* yang ditandatangani oleh ketiga negara yang menandatangani dokumen pertama akan tetapi ditambah dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, dokumen yang kedua menjelaskan tekad dan komitmen para pihak yang menandatangani perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Pada tahun 2013 terdapat suatu dokumen tambahan yang berisi suatu implementasi atau pelaksanaan pokok - pokok perjanjian yang telah disepakati ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri negara - negara Timur Tengah. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak menyebut secara langsung negara Qatar, karena perjanjian tersebut berlaku bagi negara negara yang menjadi anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari 6 negara, yaitu, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait,

dan Arab Saudi, setelah dokumen perjanjian tersebut dipublikasikan oleh *Cable News Network* (CNN) Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menyatakan perjanjian yang telah disepakati bertujuan untuk menyelesaikan suatu pertikaian Qatar negara – negara Timur Tengah serta mengeluarkan pernyataan bahwa Qatar telah gagal melaksanakan dan mewujudkan komitmennya. Disebabkan Qatar telah gagal mewujudkan komitmen yang telah disepakati, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas sumpahnya sehingga Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memberikan sanksi pemutusan hubungan diplomati dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan, yakni, menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), untuk memenuhi suatu janji dan komitmen yang sebelumnya sudah tercantum dalam perjanjian “Kesepakatan Riyadh”. Tetapi pernyataan yang dilontarkan ditanggapi oleh Qatar 13 (tiga belas) tuntutan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan “ Kesepakatan Riyadh” media resmi *Qatar News Agency* (QNA) menjelaskan kesepakatan tersebut

bertujuan menghindari intervensi internal negara dan untuk meningkatkan kerjasama antara negara Teluk, justru tuntutan yang diberikan menyerang kedaulatan Qatar dan merusak eksistensi “Kesepakatan Riyadh”.¹

Melansir Al Arabiya pada hari Selasa tahun 2017 bahwa perjanjian pertama yang ditandatangani pada tahun 2013, dimediasi oleh Kuwait dan ditandatangani oleh Emir Qatar Tamim bin Hamad al - Thani, dimana dia berjanji untuk menerapkan persyaratan kesepakatan tersebut di hadapan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Dokumen-dokumen perjanjian pertama menunjukkan bahwa Sheikh Tamim menandatangani semua hal yang diminta oleh negara-negara Teluk, dan pentingnya membangun fase baru hubungan persaudaraan. Perjanjian kedua yang tertuang pada tanggal 16 November tahun 2014, menambahkan Raja Bahrain, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Permintaan yang paling menonjol yang disepakati oleh Sheikh Tamim dalam kesepakatan tahun 2014 adalah menggantikan dukungan Qatar untuk Ikhwanul Muslimim, dan pengusiran semua afiliasi non-warganya dari Qatar. Qatar juga berjanji untuk tidak membawa orang-orang yang memiliki agenda berbahaya ke Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan tidak mendukung organisasi manapun yang memerangi pemerintah yang sah di Yaman dan Mesir. Salah satu klausul yang ditandatangani oleh Qatar dalam Perjanjian Umum Pelengkap tahun 2014 adalah Doha menghentikan semua pekerjaan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung

¹ *Ibid*

kepada para profesional media dan outlet yang memiliki agenda anti-Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Qatar juga sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara GCC dalam mendukung Mesir dan menjaga keamanan dan stabilitasnya dan secara khusus, menghentikan penghinaan yang diarahkan Al Jazeera *Media Channel* dan saluran Al-Jazeera *Egypt Live*. Qatar memutuskan untuk membubarkan dan menutup Mubasher Misr setelah kesepakatan ditandatangani saat itu. Dokumen tersebut mengungkapkan tuntutan yang diminta dari Qatar, yang menandatangani dan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Emir Qatar, Tamim bin Hamad, dirinya menandatangani semua klausul yang memungkinkan tindakan jika terjadi ketidakpatuhan. Adapun bunyi perjanjian tersebut yakni ; "Jika terjadi ketidakpatuhan oleh negara manapun, adalah hak negara lain untuk mengambil apa yang dianggap tepat untuk melindungi keamanan dan stabilitasnya."² Perlu dipahami bahwa Qatar dengan melalui mediator, bahwa siapapun mediatornya, Qatar dapat memahami inti permasalahan ekstremisme, terorisme, gangguan, yang akan ditujukan kepada mereka, ketika hal itu diterima oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab maka hal tersebut kembali ke perjanjian 2014 yang berlangsung sejak tiga tahun terakhir, dan kemudian diatasi melalui

² <https://international.sindonews.com/read/1219691/43/ini-isi-perjanjian-rahasia-qatar-saudi-cs-1499765817> diakses pada hari senin, 25 Pukul 23.00 WIB

mekanisme di mana hal itu diyakini akan menepati janji yang telah diperjanjikan sebelumnya.³

2. Latar belakang Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab keempat negara - negara ini memutuskan hubungan dengan Qatar pada bulan Juni tahun 2017, dengan tuduhan mendukung kelompok jihadis. Tetapi Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Arab Saudi membantah tuduhan tersebut, kemudian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengatakan bahwa penolakan Qatar terhadap 13 (tiga belas) permintaan mereka "menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kebijakannya, yang bertujuan untuk mendestabilisasi keamanan di wilayahnya serta mengancam akan mengeluarkan kebijakan politik dan ekonomi baru terhadap Qatar, tanpa menyampaikannya secara detail. Adapun permintaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab antara lain meminta Qatar agar menutup saluran Al Jazeera dan mengurangi hubungan dengan Iran, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan waktu 10 (sepuluh hari) terhadap Qatar untuk memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan termasuk menutup saluran Al Jazeera,

³ Harvard, *UAE foreign minister on Qatar crisis*, www.ebscohost.com diakses pada hari Rabu, 27 September 2017 Pukul 22 : 00 WIB

menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Akan tetapi Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan menolak permintaan tersebut, tetapi siap untuk berdialog dalam situasi yang tepat, dan Arab Saudi dan sekutunya memperpanjang masa batas waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhadap Qatar untuk menerima tuntutan mereka. Hal ini berdampak buruk terhadap Qatar baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya bagi masyarakat Qatar dan mempunyai implikasi terhadap negara lainnya, hal ini merupakan suatu penataan kembali Timur Tengah sejak 50 tahun yang lalu yakni Perang Enam Hari pada bulan Juni 1967 antara Israel dan tetangga Arabnya, di antara penyebab langsung konflik ini, yang dalam banyak hal menentukan sejarah berikutnya di Timur Tengah, adalah pengusiran oleh Presiden Gamal Abdel Nasser dari pengamat Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dari Sinai dan penutupan Selat Tiran ke pengiriman Israel pada tanggal 5 Juni tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir mengumumkan bahwa mereka memotong hubungan diplomatik dengan negara Teluk kecil Qatar; menutup batas

tanah, udara dan laut mereka, memberi warga negara Qatar di perbatasan mereka dua minggu untuk pergi dan dalam kasus empat negara pertama, menginstruksikan warga negaranya untuk meninggalkan Qatar. Yaman, Maladewa dan pemerintah Tobruk di Libya telah bergabung kemudian. Selain itu, 200 anggota Al ash-Sheikh, keturunan Arab Saudi Muhammad ibn Abd al-Wahhab, setelah nama Wahhabisme disebutkan, baru-baru ini menuduh Qatar, yang mengklaim untuk befforthodoxly Salafi, tidak mengikuti ajaran sejatinya.

Qatar bukanlah entitas musuh karena Israel adalah untuk orang - orang Arab pada tahun 1967. Ini adalah anggota pendiri Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada tahun 1981 dan telah berusaha dalam 20 tahun terakhir untuk menetapkan posisi sebagai mediator dalam hubungan intra - Sengketa Arab dan intra - Islam. Dalam istilah per kapita bergantung pada harga energi ini adalah salah satu negara terkaya di dunia, bagi kita yang telah menyaksikan kawasan ini selama puluhan tahun, krisis ini tidak datang entah dari mana. Hubungan Qatar dengan tetangganya di daerah yang semakin terpolarisasi sudah tidak nyaman untuk waktu yang lama. Pada tahun 1971 rencananya adalah bahwa baik Qatar dan Bahrain akan bergabung dengan sheikhdoms tetangga ke tenggara dalam sebuah federasi di Teluk yang lebih rendah. Masing - masing memutuskan mereka akan lebih baik sebagai perusahaan kecil tapi independen. Qatar tumbuh kaya namun tetap mengantuk sampai tahun 1995, ketika ayah penguasa saat ini

memecat ayahnya sendiri, yang berada di luar negeri saat itu, dalam sebuah kudeta tak berdarah, pada kekecewaan Arab Saudi.

Itulah awal dari masa perkembangan fisik dan politik yang cepat di Doha, dengan Sheikh Hamad menggunakan pendapatannya yang besar untuk mengubah tempat yang tetap seperti yang terjadi pada tahun 1950an menjadi sebuah kota metropolitan yang penuh dengan menara, kaca berkilau, kantor megah dan hotel, tanah reklamasi dan museum modern. Dia memutuskan bahwa Qatar harus membuat tanda internasional, tidak harus selaras dengan GCC. Qatar memediasi antara Hamas dan Fatah, di antara berbagai faksi Taliban Afghanistan, di Yaman dan dengan Iran. Ini dilaporkan membiayai uang tebusan untuk sandera yang dimiliki oleh sejumlah kelompok Islam yang keras. Orang - orang Arab Saudi percaya bahwa Qatar terlibat dalam plot setengah matang oleh Muammar al-Gaddafi Libya untuk membunuh Pangeran Mahkota Abdullah pada tahun 2003. Orang - orang Bahrain dan Arab Saudi percaya dan masih melakukannya - bahwa Qatar telah berusaha untuk memanipulasi loyalitas suku beberapa warga negaranya. Uni Emirat Arab marah atas serangan publik atas legitimasi para penguasa yang dibawa oleh Al Jazeera dan gerai-gerai berita yang didanai Qatari lainnya. Ketika revolusi di Libya dimulai pada bulan Februari 2011, Qatar adalah salah satu negara bagian pertama yang membangun kehadiran di lapangan dan memberikan dukungan kepada elemen - elemen oposisi. Hal itu juga terjadi di Suriah. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar dari hal ini memotong seluruh mitra di Dewan

Kerjasama Teluk (GCC), terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menginginkannya. Dan sangat sedikit yang menghalangi konsultasi Arab tradisional. Baru-baru ini ada episode yang luar biasa. Irak, di mana Qatar, dalam perundingan langsung dengan Lebanon Hizbullah, Iran dan cabang Al-Qaeda di Suriah, dilaporkan telah menjamin pembebasan sebuah partai Qatari senior, termasuk anggota keluarga yang berkuasa, yang telah diculik oleh milisi Syiah yang didukung Iran sementara dalam perjalanan berburu yang tidak disengaja di dekat Basra pada bulan Desember 2015. Itu mungkin sebagian dibelakang tuduhan oleh Manama bahwa Qatar mendukung kelompok pembangkang Syiah bersenjata dan kekerasan di Bahrain. Namun, di balik semua ini, ada ketakutan yang lebih luas di negara - negara yang melihat gerakan Islam terorganisir Sunni atau Syiah, kekerasan atau tidak sebagai ancaman besar tidak hanya untuk stabilitas mereka sendiri, namun juga terhadap stabilitas, keamanan dan kemakmuran daerah secara keseluruhan; dan solidaritas sebagai dasar respon apapun. Itu termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Hal ini menimbulkan keinginan untuk berdebat tentang sifat yang tepat dari ancaman ini. Tapi sangat sulit untuk mengklaim bahwa Kelompok Pertarungan Islam Libya, Hizbullah Lebanon, Jabhat al-Nusra, Hay'at Tahrir al-Sham, Ahrar al-Sham, Kata'ib Hizbullah dan Hamas - untuk menyebutkan beberapa di antaranya Qatar dituduh untuk mempertahankan tautan materi tidak berbahaya. Dan ketika tetangga memandang Ikhwanul Muslimin secara keseluruhan sebagai sumber asli dari banyak risiko

ideasional terhadap dispensasi politik dan sosial mereka, untuk membuat begitu banyak dukungan bagi mereka, terlihat seperti sebuah kesalahan yang mulai berkuasa setelah ayahnya berhenti. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengancam akan melakukan tindakan serupa terhadap Qatar saat itu. Tamim datang ke Riyadh untuk pertemuan rekonsiliasi dengan almarhum rekan - rekan Raja Abdullah dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Dia dilaporkan setuju untuk menghubungi Qatar untuk mengejar *exceptionalism*, hanya meminta waktu untuk memperbaiki apa yang telah dibangun lebih dari satu dekade. Kelihatannya sekarang seolah sudah habis. Selama kunjungan terakhir Presiden Trump ke Riyadh, ada laporan tentang perselisihan pribadi yang hangat antara Qatar dan beberapa negara lain yang hadir, termasuk tuan rumah. Seminggu yang lalu ada laporan di media regional, ditolak oleh Qatar, bahwa emir telah mengkritik fokus yang kuat pada Iran. Apapun kebenarannya, ini dan hubungan Qatar yang terus berlanjut dengan orang-orang yang dianggap oleh negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) lainnya sebagai musuh bebuyutan mereka pada saat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mencari penataan kembali pasukan anti - Iran di wilayah tersebut dan aliansi yang lebih struktural dengan Mesir - di Terlepas dari semua kesulitan yang masih ada kaitannya dengan perintah keamanan Arab, tampaknya telah membujuk Riyadh, Kairo, Manama dan Abu Dhabi dengan sungguh - sungguh.⁴ Arab Saudi, Uni

⁴ Jenkins, John, *Qatar is out in the cold*, www.ebscohost.com, diakses pada hari Kamis, 20 September 2017, pukul 09.00 WIB

Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar awal bulan lalu sebagian besar atas tuduhan mereka bahwa mereka mendukung kelompok ekstremis - sebuah tuduhan yang ditolak Qatar. Pada hari Senin, pihaknya menyerahkan sebuah tanggapan terhadap daftar tuntutan 13 (tiga belas) poin yang dibuat oleh empat negara Arab yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Qatar Petroleum mengatakan bahwa, “peningkatan produksi yang diantisipasi berasal dari keputusan untuk menggandakan produksi dari proyek gas baru di bagian selatan Lapangan Utara bawah laut yang luas, yang Qatar berbagi dengan tetangganya, Iran. Negara - negara Arab telah menuntut Qatar mengekang hubungannya dengan Iran.”⁵

3. Klaim Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengenai pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional

Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengungkapkan Qatar telah melanggar perjanjian rahasia yang mereka sepakati beberapa tahun lalu di Riyadh, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab. Setidaknya ada dua perjanjian yang disepakati diantara kedua pihak antara tahun 2013 dan tahun 2014.⁶ Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash mengatakan kepada *The Associated Press* bahwa Qatar telah "memilih untuk mengendarai harimau dari ekstremisme dan

⁵ Harvard, “*Analyst, Gas Announcement Is Political*”, *Op.Cit*, hlm. 2

⁶ *Ibid*

terorisme" dan sekarang perlu membayar harganya. Qatar "mutlak" harus mengusir anggota Hamas, menghentikan dukungannya terhadap kelompok teror "dengan DNA al-Qaida" di seluruh dunia dan mengendalikan banyak media yang didanainya, yang merupakan kepala di antara jaringan berita satelit Doha Al-Jazeera.⁷ Perjanjian yang disebut sebagai 'Kesepakatan Riyadh' itu secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan dalam dokumen pertama, negara-negara yang menandatangani juga bersumpah untuk tidak mendukung 'media antagonis', yang diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Al Jazeera dituding banyak mendukung kelompok-kelompok oposisi di kawasan Teluk, termasuk di Mesir dan Bahrain. Kemudian dokumen kedua yang diberi kop '*top secret*' dan bertanggal 16 November tahun 2014, ditandatangani oleh tiga negara pertama ditambah Raja Bahrain, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Oleh karena itu Dokumen kedua secara spesifik menyatakan komitmen para penandatangan dalam mendukung stabilitas Mesir, termasuk mencegah Al Jazeera untuk dijadikan platform kelompok maupun tokoh yang menentang otoritas Mesir. Gargash mencantumkan sejumlah kelompok yang dia duga telah didanai Qatar, termasuk cabang al-Qaida di Suriah dan Somalia, militan di Semenanjung Sinai Mesir dan kelompok lainnya dengan "organisasi al-Qaida" di Libya. Dia tidak

⁷ Donald Trump, Hamad bin Khalifa, Tamim bin Hamad Al Thani, *UAE foreign minister on Qatar crisis, op,cit*

menawarkan dokumen untuk mendukung klaimnya, namun pejabat Barat lama menuduh pemerintah Qatar mengizinkan atau bahkan mendorong pendanaan ekstremis Sunni. Gargash juga pada hari Rabu menyebut *tweet* Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Qatar "sangat berani dan luar biasa." Dia mengatakan kepada *The Associated Press*: "Apa yang dia katakan di depan umum, di *tweets*, adalah apa yang dikatakan secara pribadi oleh politisi Amerika Serikat, oleh politisi Eropa, oleh politisi Arab." Dan menambahkan bahwa hal ini merupakan sinyal bagi Qatar masa bermuka dua, melakukan sesuatu secara terbuka dan melakukan sesuatu yang lain secara pribadi, telah berakhir." Donald Trump membuat serangkaian *tweet* yang dilontarkan pada hari Selasa untuk mempertanyakan komitmennya kepada negara semenanjung tersebut setelah sebelumnya mengatakan kepada emir Qatar bahwa "kita sudah lama berteman sekarang." Gargash mengemukakan, "keluhan tentang Qatar yang kembali ke tahun lalu, yang mungkin menyiratkan kritik tersebut difokuskan pada Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani." Sheikh Hamad mengambil alih posisi sebagai emir Qatar pada tahun 1995 dan memperluas kehadiran negaranya di kancah internasional melalui negosiasi pelepasan sandera, yang secara singkat menggoda hubungan diplomatik dengan Israel, menjadi tuan rumah sebuah kantor Taliban dan menciptakan Al-Jazeera. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, anaknya, karena emir Qatar pada tahun 2013, namun Sheikh Hamad masih tampak besar di dunia Muslim Qatar yang ketat dan ketat.⁸ Jadi ketika

⁸ *Ibid*

saluran satelit al-Jazeera memulai siarannya pada tahun 1996 dari negara Teluk Persia di Qatar, lebih dari sekedar revolusi digital lahir. Untuk pertama kalinya, orang-orang Arab dapat menonton program berita dan talk show dalam bahasa mereka sendiri dan dikumpulkan oleh jurnalis independen daripada oleh propagandis pemerintah. Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani, 53, Emir Qatar, telah menanggung beban politik dan biaya keuangan untuk mensponsori al-Jazeera, sekitar 35 juta pemirsa, jaringan tersebut ditiru oleh seluruh wilayah. Al-Jazeera telah membuat marah pemerintah Arab dengan memberi *air time* untuk memberontak gerakan dan pendukung kebebasan dan menangani topik tabu seperti poligami dan kemurtadan dan opini Arab telah sangat dipengaruhi oleh liputan al-Jazeera tentang intipade Palestina dan perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak.⁹ Khater berpendapat, bahwa ;

“..... ini adalah perpisahan untuk penyensoran, karena kesukaan regional untuk cuplikan pemimpin Arab melambai di landasan pacu bandara, dijuluki dengan *soundtrack marching band* tahun 1930an. "Al Jazeera adalah kebebasan penuh .Al Jazeera berusaha memasuki ranah diskusi terbuka yang jarang dilakukan oleh lembaga penyiaran lain di wilayah ini. Pemirsa dapat melihat anggota Ikhwanul Muslimin yang mendaftar penyiksaan di Suriah, atau seorang sarjana Islam yang berpendapat bahwa penjelasan para ulama tidak

⁹ MacLeod, Scott, *Al-Jazeera: TV as a Powerful Wind of Change*, www.ebscohost.com diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 21 : 30 WIB

memiliki otoritas Alquran."Inilah mengapa saya takut pada Al Jazeera,".Wartawan di dunia Arab dianggap sebagai ancaman. Pada tahun lalu, biro Al Jazeera telah ditutup sementara di Kuwait dan Yordania; seorang wartawan Aljazair dilucuti dari izinnya, pemerintah Maroko membatalkan sebuah pertunjukan tentang demokrasi, seorang karyawan dideportasi dari Bahrain dan Penyiaran Uni Arab menolak permohonan keanggotaannya. Arab Saudi memiliki larangan tetap pada wartawan Al Jazeera dibandingkan dengan media Barat, konsep Al Jazeera lebih dekat dalam semangat *pers underground* Soviet lama daripada *Cable News Network* (CNN).¹⁰

Sedangkan Jamal Demiloj berpendapat bahwa" Al Jazeera menyediakan ruang kebebasan bagi pemirsa Arab, Sebelumnya, orang Arab tidak tahu kebebasan media."¹¹

4. Tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar

Arab Saudi, Bahrain Mesir dan Uni Emirat Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar mengeluarkan daftar permintaan untuk mengakhiri krisis tersebut, dengan bersikeras bahwa selubung tetangganya di Teluk Persia Al-Jazeera, menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan

¹⁰ Parker, Ned, *Tiny Qatar beams big signal to Arab world*, www.ebscohost.com diakses pada hari Rabu, 27 september 2017, pukul 19.00 WIB

¹¹ *Ibid*

mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Qatar, dalam daftar 13 (tiga belas) poin yang dipresentasikan kepada Qatar oleh Kuwait, yang membantu menengahi krisis - negara-negara tersebut. *Associated Press* memperoleh salinan daftar dalam bahasa Arab dari salah satu negara yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan dengan Qatar bulan ini karena tuduhan bahwa negara Teluk Persia mendanai terorisme tuduhan bahwa Presiden Donald Trump telah bergema. Negara - negara tersebut sekarang telah memberi Qatar 10 hari untuk memenuhi semua tuntutan, termasuk membayar jumlah yang tidak ditentukan sebagai kompensasi. Menurut daftar tersebut, Qatar harus menolak untuk menasehati warga negara dari empat negara dan mengusir orang-orang yang saat ini berada di Qatar, dalam apa yang digambarkan oleh negara-negara tersebut sebagai upaya untuk mencegah Qatar mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Mereka juga menuntut agar Qatar menyerahkan semua individu yang diinginkan oleh empat negara untuk terorisme tersebut; berhenti

mendanai entitas ekstremis yang ditunjuk sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat; dan memberikan informasi rinci tentang tokoh oposisi yang didanai Qatar, seolah - olah di Arab Saudi dan negara - negara lain. Pemerintah Qatar tidak segera bereaksi terhadap daftar tersebut. Amerika Serikat juga tidak, Sekretaris Negara Rex Tillerson bersikeras bahwa tetangga Qatar memberikan daftar tuntutan yang "masuk akal dan dapat ditindaklanjuti". Meskipun tetangga Qatar telah memusatkan perhatian mereka atas tuduhan dukungan Qatari terhadap ekstremisme, mereka juga menyuarakan keprihatinan keras mengenai hubungan Qatar dengan Iran, negara yang dipimpin Syiah yang merupakan musuh regional untuk Arab Saudi dan negara - negara pimpinan Sunni lainnya. Ketentuan Iran dalam dokumen tersebut mengatakan bahwa Qatar harus menutup jabatan diplomatik di Iran, menendang keluar dari Qatar seorang anggota Garda Revolusi elit Iran, dan hanya melakukan perdagangan dan perdagangan dengan Iran yang mematuhi sanksi Amerika Serikat berdasarkan kesepakatan nuklir tahun 2015, sanksi terkait nuklir terhadap Iran telah berkurang namun sanksi lainnya tetap berlaku. Tuntutan terhadap Al-Jazeera, penyiar satelit yang berbasis di Doha, menyatakan bahwa Qatar juga harus menutup semua afiliasi. Itu mungkin berarti Qatar harus menutup afiliasi bahasa Inggris Al-Jazeera. Tetangga Qatar menuduh Al-Jazeera mengalami kerusuhan di wilayah tersebut dan mendukung Ikhwanul Muslimin. Jika Qatar setuju untuk mematuhi, daftar tersebut menegaskan bahwa dia akan diaudit sebulan sekali untuk tahun pertama, dan kemudian

sekali per kuartal di tahun kedua setelah mulai berlaku. Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan dipantau setiap tahun untuk kepatuhan.¹² Pada hari Kamis, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengajukan 13 (tiga belas) daftar tuntutan ke Qatar pada hari Kamis dan memberikannya 10 (sepuluh) hari untuk mengambil tindakan. Mereka telah memberi isyarat bahwa jika Qatar menolak mematuhi batas waktu, mereka akan terus membatasi aksesnya ke jalur darat, laut dan udara tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi yang meningkat di negara Teluk Persia. Tuntutan tersebut mencakup pemerintah menutup Al-Jazeera, mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan memutuskan semua hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Permintaan lain adalah Qatar mengusir warga dari empat negara, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk mencegah agar Qatar tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.¹³ Negara-negara Arab telah memblokir kapal-kapal Qatar memasuki wilayah udara mereka, dan juga menggunakan pelabuhan mereka karena Arab Saudi telah menutup perbatasan daratnya. Sementara maskapai penerbangan Qatar Airways sekarang terbang semakin ke Iran dan Turki, maskapai tersebut telah diblokir dari tempat pendaratan di tempat lain di Timur Tengah. Kantor Al

¹² Lederman, Josh, , *Arab Neighbor Demand Qatar Shutter Al- Jazeera and Cut Ties with iran to end diplomatic*, www.ebscohost.com diakses pada hari kamis, 20 september 2017, pukul 22.00 WIB

¹³ *Donald Trump, Hamad bin Khalifa, Tamim bin Hamad Al Thani, UAE foreign minister on Qatar crisis, op.cit*

Jazeera juga telah ditutup oleh pihak berwenang di Arab Saudi dan Yordania.¹⁴

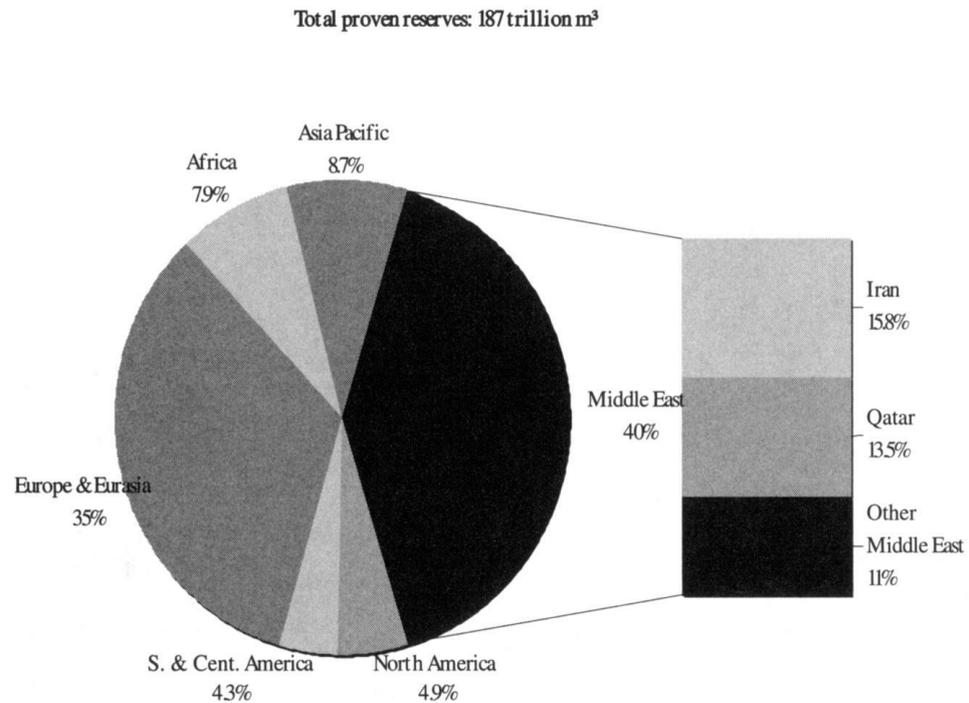
5. Urgensi hubungan diplomatik Qatar bagi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab, “Hanya tindakan dari Qatar yang bisa memperbaiki hubungan dengan negara-negara Teluk.”Krisis saat ini adalah hasil dari tahun-tahun masalah dengan posisi politik Qatar, khususnya hubungan yang sangat menjengkelkan dengan Ikhwanul Muslimin dan Iran. Ini adalah masalah yang negara - negara Teluk benar - benar merasa mempengaruhi keamanan dan stabilitas mereka. Kemakmuran terus – menerus, negara - negara Teluk dan itu termasuk kemakmuran Qatar, karena seperti yang diputuskan oleh rute udara, laut dan darat menunjukkan, negara ini sangat dekat dengan tetangganya mengharuskan Qatar kembali. Masih ada jalan keluar dari krisis ini, namun memerlukan suatu gerakan dari Doha karena begitu seriusnya krisis ini, hanya suatu tindakan nyata dan perubahan politik yang akhirnya akan memperbaiki hubungan.¹⁵ Namun analis mempercayai bahwa Qatar posisinya sebagai pengeksport gas alam cair terbesar di dunia dapat melindunginya dari krisis diplomatik terburuk yang sampai di Teluk dalam beberapa dasawarsa.

¹⁴ *Ibid*

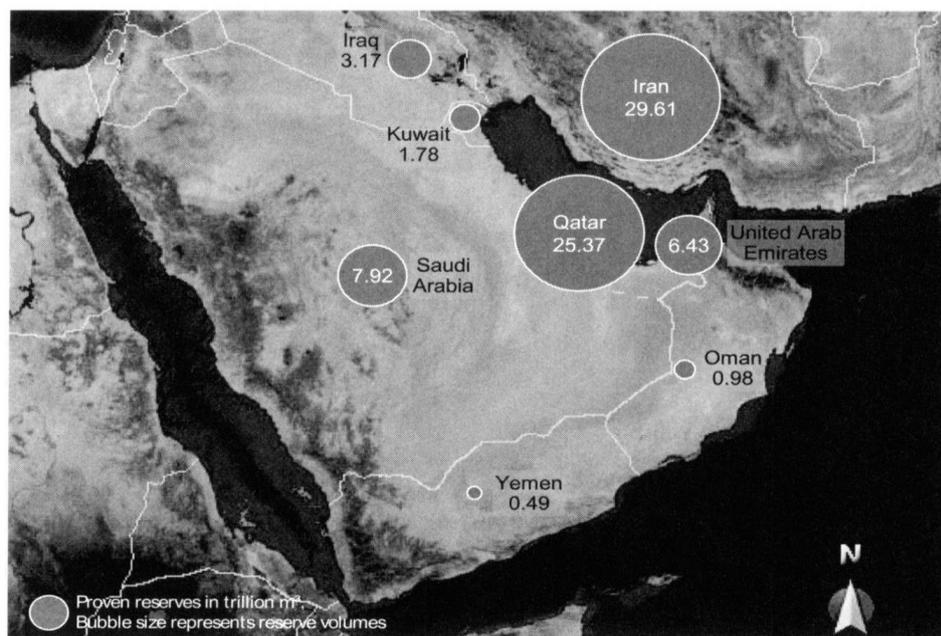
¹⁵ Editors, Monitor, *Terror response must go beyond policing social media*, www.ebscohost.com diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 20.00 WIB

Figure 1 : Distribution of proven natural Gas reserves in the world (trillion m3)



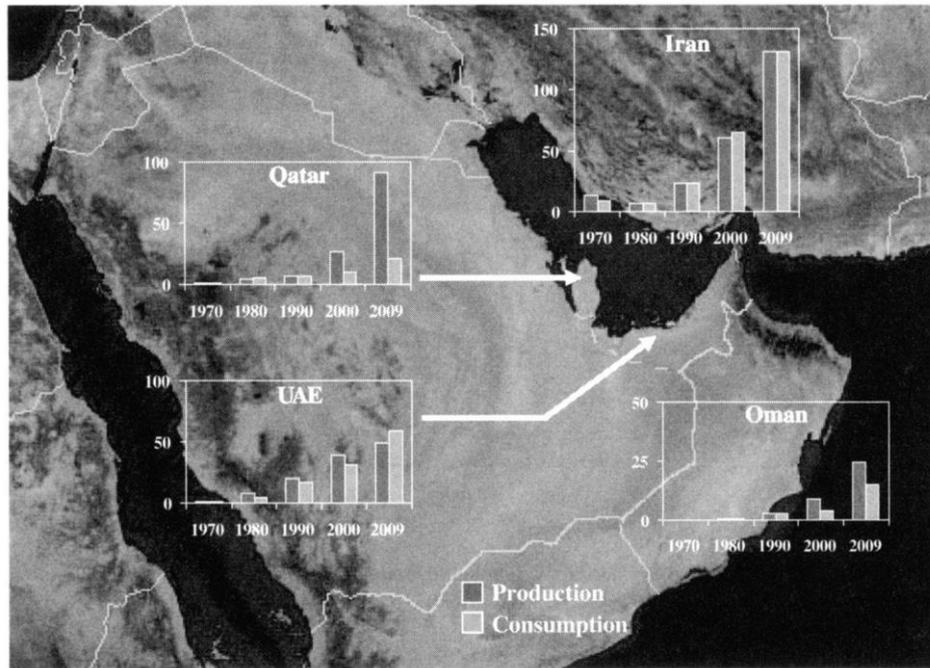
Sumber : *International Association for Energi Economic (IAEE)*

Figure 2 : Proven Natural Gas In The Middle East (trillion m3)



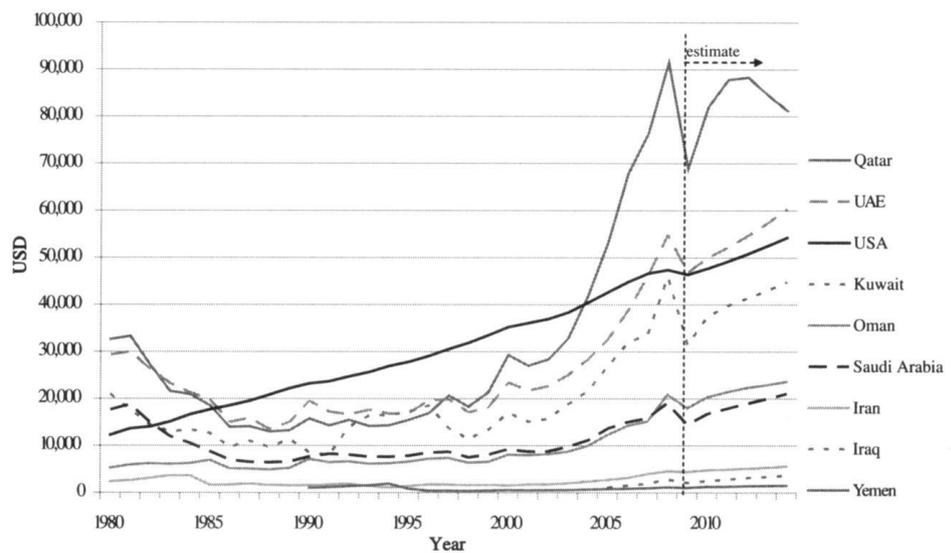
Sumber : *International Association for Energy Economic (IAEE)*

Figure 3 : *Production and Domestic Consumption in Middle East Countries*



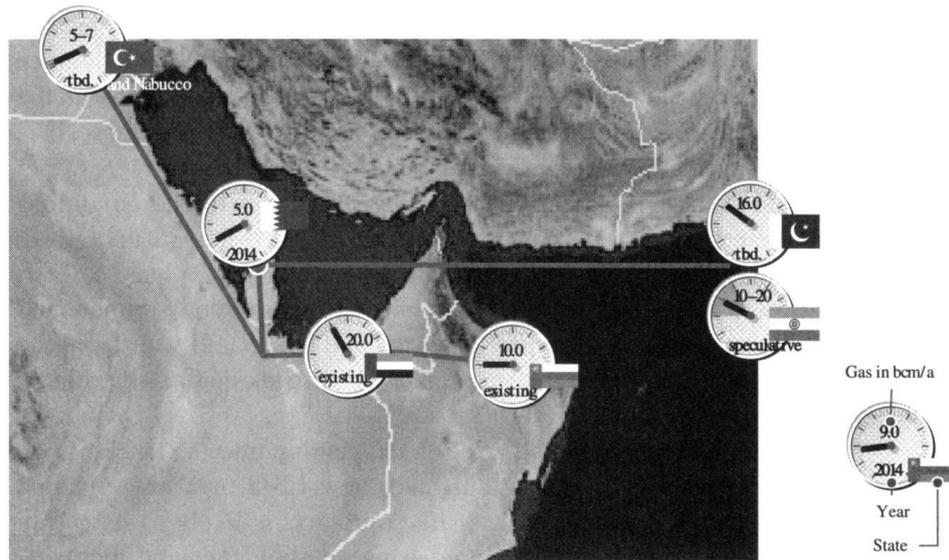
Sumber : *International Association for Energy Economic (IAEE)*

Figure 4 : *GDP per Capita in The Middle East*



Sumber : *International Association for Energy Economic (IAEE)*

Figure 5 : *Qatar's Pipeline Exports*



Sumber : *International Association for Energy Economic (IAEE)*

Kyle Stelma dari firma analisis risiko dan keuangan yang berbasis di Dubai, Whispering Bell, mengatakan, bahwa “ Qatar memiliki "titik leverage" kekayaan yang luar biasa dan kenyataan bahwa negara tersebut bertanggung jawab atas 30 (tiga puluh) persen pasokan gas alam cair dunia.” Namun sebuah pernyataan dari perusahaan Qatar Frank menyatakan bahwa “ Uni Emirat Arab, Mesir dan Yordania mengandalkan gas alam yang dipasok oleh Qatar. Qatar bisa melakukan pembalasan dengan mematikan pipa bawah laut *Dolphin Energy*, yang mengirimkan sekitar 2 (dua) miliar kaki kubik (56 juta meter kubik) gas alam sehari ke Uni Emirat Arab.”¹⁶ Qatar yang terus mendominasi pasar gas alam cair global dan mencoba

¹⁶ Video, *How will Gulf crisis affect economies*, www.ebscohost.com, diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 14.00 WIB

untuk menunda pesaing lain seperti Amerika Serikat dan Australia dan Afrika Timur dan negara - negara lain yang mungkin memasuki pasar pada awal 2020 - an, serta mencoba untuk menjelaskan bahwa bagi perusahaan dan negara tersebut, jangan berharap harga LNG akan setinggi dan jangan berharap pasar tidak dipasok. Jadi itu adalah bagian dari itu dan ada alasan pasar untuk itu. Qatar mengatakan, bahwa “ kita dapat terus berlanjut meski ada blokade ini, kita dapat terus meluncurkan proyek - proyek besar dan kita dapat terus menarik investasi energi dan kita masih merupakan global penting. pemain dalam energi dan karena itu mereka mencoba mengirim pesan ke sekutu dan pendukung mereka sehingga mereka dapat diandalkan.” Kesepakatan OPEC mengenai produksi minyak terus berlanjut, sejauh ini dampaknya sangat kecil. Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak akan memilih untuk mengganggu pasokan tersebut, karena mereka memiliki reputasi sebagai pemasok terpercaya jika mereka mulai bermain politik, kemudian pelanggan mereka yang lain seperti Jepang dan Korea misalnya akan khawatir bahwa pada suatu saat mereka mungkin akan terperangkap.¹⁷ Qatar mengirim miliaran dolar bantuan ke Mesir selama masa jabatan presiden Mohammed Morsi dari tahun 2012 sampai tahun 2013, dan telah menjanjikan ratusan juta dolar untuk Hamas. Negara teluk kecil adalah salah satu negara terkaya di dunia berkat cadangan minyaknya, dan telah memiliki pengaruh yang lebih regional selama bertahun-tahun. Analis mengatakan bahwa ketegangan tersebut dapat berdampak ekonomi

¹⁷ *Ibid*

bagi negara - negara Teluk, yang memasok sekitar seperlima dari minyak mentah dunia dan memiliki produk domestik bruto gabungan sebesar \$ 1,6 triliun.¹⁸ Qatar merupakan negara perdagangan yang paling kuat untuk perokonomian masyarakat sebab dididominasi oleh para investor dari perusahaan dari segi ekonomi lokal dan merupakan kontrol politik yang penting dalam konstitusi politik karena unggul dalam finansial dan pertahanan militer, sejarah yang memainkan peran penting dalam formasi negara di dunia yang mempunyai prestasi dibidang perminyakan.¹⁹ Qatar yang merupakan negara kecil yang mempunyai kedudukan yang penting dari aspek finansial atau ekonomi bagi Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi dalam hubungan diplomatik serta produksi minyak, menurut Schumucher “ meskipun Qatar tidak mempunyai wilayah yang luas akan tetapi didalamnya terdapat banyak kehidupan, khususnya negara – negara yang mempunyai konsekuensi yang berbahaya, dapat dikatakan bahwa Qatar sebagai unit politik kecil didalamnya terdapat sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan baik daripada hal – hal yang lebih besar.”²⁰

Tabel 1 : Perbandingan pendapatan perkapita dan pengeluaran

<i>Country</i>	<i>Literacy rate</i>	<i>GDP per capita</i>	<i>PPE as of GDP per capita</i>

¹⁸ Bremmer, ian,, *The Qatar Rift Is the Middle East's 'Trump Effect' In Action*, www.ebscohost.com diakses pada hari kamis, 20 September 2017 Pukul 15.00 WIB

¹⁹ Jill Crystal, “*Coalition In Oil Monarchi Kuwait And Qatar*” *Comprative Politic*, IV (Juli, 1989), hlm 1-2

²⁰ J.E Peterson, “Qatar and the world branding for a micro state” *The Middle East Journal*, IV (Agustus, 2006) hlm. 3

<i>Intra - regional comparison</i>			
Qatar	89.0	30,566	10
Bahrain	89.1	18,576	18
Iran	79.4	7,488	12
Israel	95.4	22,388	23
Jordan	91.3	4,609	15
Kuwait	83.5	16,038	16
Lebanon	87.4	6,601	n.a
Oman	75.8	16,162	15
Uni Emirat Arab	77.9	27,799	7
<i>Extra – regional comparison</i>			
Australia	99.0	29,859	17
Austria	98.0	32,232	24
Firlandia	100.0	29,952	18
Prancis	99.0	28,288	18
Jerman	99.0	29,581	17
Jepang	99.0	29,288	22
Belanda	99.0	29,957	18
Selandia baru	99.0	23,794	19

Swedia	99.0	28,524	23
Switzerland	99.0	31,583	24
Amerika serikat	99.0	39,377	21

Sumber : *Middle East Institute*

Qatar merupakan suatu negara yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja serta perkembangan pendidikan.²¹

Tabel 2 : Kontribusi Qatar dalam bidang sektor ekonomi dan pendidikan

<i>Men</i>	<i>More than secondary</i>	<i>Some secondary</i>	<i>No secondary</i>
<i>Government administration (include diplomatic international aand regional</i>	0.70	0.67	0.81
<i>Government esthablished company</i>	0.15	0.20	0.11
<i>Mixed</i>	0.08	0.08	0.04
<i>Private</i>	0.06	0.05	0.04

²¹ Claude Berrebi, Francisco Mattorel and Jeffrey C Tanner, "Qatar labor markets at a crucial crossroad", *The Middle East Journal*, III, (Maret, 2009), hlm, 1

<i>Household</i>	0.00	0.00	0.04
<i>Women</i>			
<i>Government administration</i>	0.90	0.65	0.83
<i>Government established company</i>	0.07	0.24	0.12
<i>Mixed</i>	0.01	0.06	0.02
<i>Private</i>	0.01	0.04	0.02
<i>Household</i>	0.00	0.00	0.01
<i>Total</i>			
<i>Government administration</i>	0.80	0.66	0.81
<i>Government established company</i>	0.11	0.21	0.11
<i>Mixed</i>	0.05	0.08	0.03
<i>Private and household</i>	0.04	0.05	0.04
<i>Government administration (include diplomatic</i>	0.70	0.60	0.81

<i>international and regional</i>			
<i>Government established company</i>	0.15	0.20	0.11
<i>Mixed</i>	0.08	0.08	0.04
<i>Private</i>	0.06	0.05	0.04
<i>Household</i>	0.00	0.00	0.04
<i>Women</i>			
<i>Government administration</i>	0.90	0.65	0.83
<i>Government established company</i>	0.07	0.24	0.12
<i>Mixed</i>	0.01	0.06	0.02
<i>Private</i>	0.01	0.04	0.02
<i>Household</i>	0.00	0.00	0.01
<i>Total</i>			
<i>Government administration</i>			
<i>Government established company</i>	0.80	0.66	0.81

<i>Mixed</i>	0.05	0.08	0.03
<i>Private and house hold</i>	0.04	0.05	0.04

Sumber : *Middle East Intitute*

Tabel 3 : distribusi ekonomi aktif terhadap penduduk yang meliputi sektor ekonomi

	<i>All</i>			<i>Qataris</i>			<i>Non Qataris</i>
	<i>All</i>	<i>Men</i>	<i>Women</i>	<i>All</i>	<i>Men</i>	<i>Women</i>	<i>All</i>
<i>Household</i>	0.12	0.06	0.46	0.00	0.00	0.00	0.14
<i>Private</i>	0.61	0.69	0.15	0.04	0.05	0.02	0.69
<i>Mixed</i>	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.02	0.03
<i>Government establlishment</i>	0.06	0.05	0.08	0.13	0.15	0.10	0.05
<i>Government administration</i>	0.18	0.16	0.29	0.77	0.74	0.85	0.10

Sumber : *Middle East Intitute*

6. Upaya Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab untuk mengakhiri sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar

Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menunjukkan sedikit tanda bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi tersebut dalam waktu dekat. Pada tanggal 25 Juli, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menolak "segala bentuk negosiasi" dengan Qatar.²² Seorang Diplomat Uni Emirat Arab terkemuka mengatakan, bahwa, "tidak ada yang bisa dinegosiasikan" dengan Qatar mengenai perselisihan diplomatik yang berkembang mengenai tuduhan pendanaan kelompok teror yang kaya energi, hal ini menandakan bahwa negara-negara Arab yang berusaha mengisolasinya tidak akan mundur.

Menteri Luar Negeri Emirati Anwar Gargash mengatakan kepada *The Associated Press*, bahwa Qatar telah "memilih untuk mengendarai harimau dari ekstremisme dan terorisme" dan sekarang perlu membayar harganya. Qatar "mutlak" harus mengusir anggota Hamas, menghentikan dukungannya terhadap kelompok teror "dengan DNA al-Qaida" di seluruh dunia dan mengendalikan banyak media yang didanainya, yang merupakan kepala di antara jaringan berita satelit Doha Al Jazeera. Sambil memuji usaha Kuwait untuk menengahi krisis, Uni Emirat Arab dan pejabat Arab Saudi berencana untuk tidak menyetujui apapun dari Qatar, hal ini lebih dari cukup bahwa sebuah hubungan perjalanan udara internasional sekarang

²² Malsin, Jared, *www.ebscohost.com* diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 23.00 WIB

terputus dari beberapa langit di sekitarnya dan diblokir karena menerima truk-truk yang penuh dengan makanan yang diandalkannya. Untuk memberi makan warganya. "Sidik jari mereka ada di tempat" dalam pendanaan teror.²³ Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain menolak untuk melakukan negosiasi dengan pernyataan "sanksi dan tuntutan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dinegosiasikan." Hal tersebut dikecam oleh beberapa negara bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

B. Klaim Qatar terhadap sanksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab

1. Klaim Qatar terhadap kesepakatan Riyadh dalam perspektif hukum perjanjian internasional

Kementrian Luar Negeri Qatar menolak segala permintaan tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab serta Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Arab Saudi, membantah tuduhan tersebut. Dokumen tersebut dirilis ke media sosial oleh para pejabat Arab Saudi. Dokumen perjanjian pada tahun 2013 dan tahun 2014 itu menunjukkan indikasi ketegangan sejak lama antara negara-negara anggota Teluk. Dokumen pertama yang ditandatangani dan tertanggal 23 November tahun 2013 yang ditandatangani oleh Raja Arab Saudi, Emir Qatar dan Emir Kuwait. Dokumen itu menjabarkan bahwa komitmen untuk

²³ *Donald Trump, Hamad bin Khalifa, Tamim bin Hamad Al Thani, UAE foreign minister on Qatar crisis, op.cit*

menghindari setiap intervensi urusan internal negara lain, termasuk melarang dukungan finansial maupun politik untuk kelompok - kelompok yang melakukan penyimpangan.

Perjanjian yang disebut sebagai 'Kesepakatan Riyadh' itu secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan. Dalam dokumen pertama, terdapat negara-negara yang menandatangani juga bersumpah untuk tidak mendukung 'media antagonis', yang diyakini hal itu merujuk pada Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Al Jazeera dituding banyak mendukung kelompok-kelompok oposisi di kawasan Teluk, termasuk di Mesir dan Bahrain. Kemudian dokumen kedua yang diberi kop '*top secret*' dan bertanggal 16 November tahun 2014, ditandatangani oleh tiga negara pertama ditambah Raja Bahrain, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Oleh karena itu dokumen kedua secara spesifik menyatakan komitmen para penandatangan dalam mendukung stabilitas Mesir, termasuk mencegah Al Jazeera untuk dijadikan *platform* kelompok maupun tokoh yang menentang otoritas Mesir. Dokumen tambahan yang terlampir pada dokumen tahun 2013, ditandatangani para Menteri Luar Negeri negara Teluk yang isinya membahas penerapan poin-poin perjanjian itu. Dokumen perjanjian itu tidak menyebut Qatar secara langsung, karena berlaku untuk seluruh negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang menandatanganinya. Dewan Kerjasama Teluk (GCC) terdiri dari 6 (enam) negara, yakni Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman,

Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dalam pernyataan gabungan yang dirilis usai dokumen itu dipublikasi *Cable News Network* (CNN), Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyebut dokumen perjanjian itu bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian antara Qatar dengan negara-negara tetangganya. Di sisi lain, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyebut dokumen itu semakin menunjukkan kegagalan Qatar dalam menjalankan komitmennya Qatar menegaskan, bahwa, “apa yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab justru telah merusak semangat “Kesepakatan Riyadh” dan merupakan 'serangan terhadap kedaulatan Qatar.” Media Qatar *News Agency* (QNA) menegaskan, bahwa, “Kesepakatan Riyadh” bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara Teluk Arab yang berdaulat dan menghindari intervensi urusan dalam negeri masing-masing.”²⁴ Qatar sangat membantah tuduhan tersebut dan melihat perselisihan tersebut bermotif politik. Kuartet tersebut menegaskan bahwa Qatar menerima 13 (tiga belas) tuntutan kuat untuk mengakhiri keretakan tersebut, termasuk menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar

²⁴ *Ibid*

Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang ditempatkan di negaranya. Akan tetapi Qatar menolak, dengan alasan bahwa tuntutan tersebut merupakan upaya untuk merongrong kedaulatannya.²⁵

2. Klaim Qatar terhadap sanksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab

Al-Kaabi mengatakan bahwa rencana pembangunan QP tidak terpengaruh oleh apa yang dia sebut "blokade" oleh kuartet Arab, dan tidak ada perubahan di tingkat komunikasi dengan Iran atas lapangan gas bersama mereka. Qatar tidak memiliki rencana saat ini untuk berhenti mengekspor gas ke Uni Emirat Arab, Kami percaya bahwa jika kita dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah MENA, kita akan diuntungkan. Jika kawasan MENA (*Middle East and North Africa*) akan menjadi tempat yang lebih damai dan makmur, Qatar akan diuntungkan. Apapun inisiatif yang telah kami coba lakukan, apakah itu Piala Dunia, Al Jazeera, *Qatar Foundation*, yang menjadi mediator di kawasan ini selama 20 tahun terakhir, kami menciptakan peluang semacam itu bukan untuk kami, sama seperti untuk daerah Kami berharap blokade ini segera terangkat, karena kami benar - benar berpikir bahwa kami berkomitmen terhadap kawasan MENA (*Middle East and North Africa*), dengan memberikan kesempatan

²⁵Al-Qatari, Hussain Schreck, Adam, *Turkey's President Erdogan Wades Into the Qatar Crisis on a Tour of the Gulf*, www.ebscohost.com, diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 Pukul 22.00 WIB

akademis dan kewirausahaan bagi kaum muda di kawasan MENA (*Middle East and North Africa*). *Qatar Foundation*, organisasi nirlaba yang mempromosikan pendidikan di negara tersebut, mengatakan bahwa program *soft diplomacy* Qatar bekerja untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh wilayah, Wakil Presiden Eksekutif Riset dan Pengembangan Hamad Al-Ibrahim, menunjuk pada tawaran Piala Dunia yang sukses, jaringan berita Al Jazeera, dan organisasinya sendiri sebagai bukti Qatar mengambil peluang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk MENA (*Middle East and North Africa*) secara keseluruhan. Tapi dengan Qatar subjek blokade regional, Al-Ibrahim berbicara di tengah kekhawatiran akan organisasinya. Analisisnya muncul saat krisis politik terus berlanjut, dengan negara - negara Arab lainnya menuduh Qatar mendukung kelompok - kelompok ekstremis. Qatar memiliki waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam untuk memenuhi tuntutan yang dibuat oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, yang telah memutuskan hubungan dan menghentikan lalu lintas udara dan darat ke Qatar berdasarkan tuduhan tersebut. Qatar telah berulang kali membantah tuduhan bahwa pihaknya mendukung ekstremisme. *Qatar Foundation*, yang didirikan pada tahun 1995 oleh Emir Qatar sebelumnya Emir Hamad Bin Khalifa Al Thani dan istrinya Moza bint Nasser juga dianggap sebagai badan diplomasi lembut nasional, yang menyelenggarakan siswa internasional regional di sebuah kampus universitas satelit, Kota Pendidikan Doha. Tapi di tengah krisis, beberapa siswa tersebut mungkin

harus pergi. Daftar 13 (tiga belas) tuntutan yang diajukan ke Qatar oleh keempat negara termasuk menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberi waktu kepada Qatar 10 (sepuluh) hari untuk memenuhi tuntutan tersebut, atau jika tidak mereka akan mengisolasi secara ekonomis. Krusial untuk Kota Pendidikan, mereka juga menuntut agar Qatar segera mengusir semua warga negara dari empat negara tersebut. Kota Pendidikan adalah rumah bagi kampus satelit untuk setengah lusin universitas Amerika Serikat dan Inggris. Lebih dari separuh mahasiswanya, lebih dari 100 (seratus) siswa, berasal dari Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir.²⁶ Menurut Menteri Luar negeri Qatar, “pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh sejumlah negara teluk merupakan upaya untuk memperlemah melawan ISIS, hal ini benar – benar merongrong upaya

²⁶ Qatari FM in London, *comments on Gulf crisis*, www.ebscohost.com diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 Pukul 16.00 WIB

global untuk melawan ekstrimisme dan terorisme dikawasan teluk”.²⁷ Qatar mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh negara tetangganya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa bahwa “tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar.”

3. Klaim Qatar terhadap tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dalam Perspektif hukum perjanjian internasional

Pemerintah Qatar sangat prihatin tentang bagaimana mempolitisir label terorisme mungkin keluar dari krisis ini jika pemerintah Barat tidak mengambil posisi yang jelas terhadap manipulasi konsep dan terminologi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manipulasi akan terus mengaburkan sumber sebenarnya dari ekstrimisme kekerasan. Mengapa negara - negara pemblokiran melakukan tindakan yang luar biasa, tidak beralasan, dan bermusuhan dengan Qatar, sehingga dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Qatar merupakan ancaman bagi mereka.²⁸ tuntutan tersebut hanya menarik perhatian negara tetangga Arab kami namun tuduhan bahwa Qatar mendukung terorisme dirancang secara jelas untuk menghasilkan sentimen anti-Qatar di Barat. Qatar bekerja melawan ideologi yang membentuk pemuda dan pemeluk terorisme, serta tirani dan kekerasan negara yang bertahan dalam terorisme. Sementara menginvestasikan 12 (dua belas) persen dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, Qatar

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171018185101-120-249289/Qatar-Sebut-Blokade-Saudi-Cs-Lemahkan-Perang-Melawan-Isis/> diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 WIB

²⁸ *Loc. Cit*

telah mengalokasikan 25 (dua puluh lima) persen bantuan luar negerinya ke pendidikan dan percaya bahwa pendidikan adalah batu penjurong stabilitas dan tindakan pencegahan ekstrem yang paling efektif. Inilah sebabnya mengapa Qatar telah menginvestasikan tujuh juta anak di 42 (empat puluh dua) negara. Qatar menentang ekstremisme kekerasan yang merupakan ancaman global bagi semua umat manusia. Namun, apa yang negara lain gagal pahami adalah memberi label lawan politik sebagai teroris, dengan hanya membungkam mereka terlepas dari perasaan kita tentang agenda mereka, keduanya tidak dapat dibenarkan dan gagal menyelesaikan masalah. Tidak hanya salah secara moral, kemungkinan akan membuat masalah lebih buruk dengan mendorong lebih banyak orang ke dalam radikalisme dan mengalihkan perhatian dari pertempuran melawan teroris sejati.²⁹ Qatar dituding bahwa telah melanggar “kesepakatan Riyadh” dengan tuduhan bahwa Al Jazeera banyak mendukung kelompok - kelompok oposisi di kawasan Teluk, termasuk di Mesir dan Bahrain. Kemudian dokumen kedua yang diberi kop *Top Secret* dan bertanggal 16 November tahun 2014, ditandatangani oleh tiga negara pertama ditambah Raja Bahrain, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Akan tetapi Qatar mengatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan sesuatu yang tidak mendasar, bahwa “Kesepakatan Riyadh” dibuat untuk menjaga stabilitas keamanan di teluk Arab dan menghindari intervensi internal masing - masing negara. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh

²⁹ *Ibid*

Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mengatakan kepada *Cable News Network* (CNN), bahwa, Penyidik FBI telah mengkonfirmasi bahwa agen tersebut telah diretas dan sebuah artikel palsu dimasukkan ke dalam sistem agensi. Menteri tersebut mengatakan "seluruh krisis didasarkan pada kesalahan informasi" yang disebabkan oleh "berita palsu". Apakah penyelidik Amerika Serikat percaya bahwa peretas yang diduga terkait dengan sindikat kejahatan Rusia atau lembaga pemerintah tetap tidak jelas, menurut laporan eksklusif *Cable News Network* (CNN), meskipun seorang pejabat mengatakan kepada penyiar bahwa "tidak banyak terjadi di negara tersebut tanpa restunya dari pemerintah."³⁰ Qatar menolak segala tuntutan yang diberikan oleh Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir, menurut Menteri luar Negeri Qatar sheikh Mohammed Bin Abdul Rahman Al-Tani, "tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan penghinaan yang tidak menghargai bahkan kami melihat aparat pemerintah arab saudi berbicara tentang perubahan rezim yang secara bersama ingin menekan dan membawa Qatar ke lembah kegelapan."³¹

Qatar yang menjadi tuan rumah salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, berada di tengah barisan diplomatik terbesar yang menerjang Teluk yang memutuskan hubungan

³⁰ Solomon, *Feliz Russian Hackers May Have Played a Role in the Qatar Diplomatic Crisis, Report Says*, www.ebscohost.com. diakses pada hari Kamis, 20 September 2017, pukul 17 :00 WIB

³¹ [Http://Www.Aljazeera.Com/News/2017/10/Qatar-Accuses-Saudi-Arabia-Promoting-Regime-Change-171018034411357.Html](http://www.aljazeera.com/news/2017/10/qatar-accuses-saudi-arabia-promoting-regime-change-171018034411357.html) diakses pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017

diplomati atas apa yang mereka katakan sebagai dukungan Qatar untuk terorisme, sebuah klaim Doha mengatakan hal tersebut tidak berdasar.³²

4. Dampak sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar

Qatar yang berada di semenanjung Arab Saudi di Teluk Persia, dampaknya sangat dramatis. Pasar sahamnya turun lebih dari 7% pada hari setelah pengumuman pemutusan hubungan diplomatik, Pembeli mengosongkan supermarket dengan panik, karena tahu bahwa negara tersebut mengimpor sekitar 40 (empat puluh) persen makanannya dari Arab Saudi. Seiring waktu, pertumbuhan akan turun, inflasi akan meningkat, pinjaman akan menjadi lebih mahal dan bisnis Qatar akan menderita. Piala Dunia FIFA Qatar tahun 2022 bahkan mungkin berisiko. Ada banyak hal yang terjadi di bawah permukaan permainan kekuatan yang mengejutkan ini. Selama bertahun-tahun, Qatar telah memperparah tetangganya yang lebih besar di Teluk, yang menyalahkan al Jazeera, jaringan Televisi yang disutradarai oleh negara Qatar, karena mengobarkan Musim Semi Arab, yang memberikan tantangan langsung kepada pemerintah mereka. Putra Mahkota Mohammed bin Zayed al-Nahyan dari Uni Emirat Arab dan pemerintah Mesir menyalahkan Qatar atas dukungannya terhadap kelompok Islam Ikhwanul Muslimin di dalam negara mereka. Yang terpenting, Pangeran Mahkota Arab Saudi dan Mohammed bin Salman, khususnya, mengambil garis keras dalam hubungan Qatar yang lebih

³² *Op.Cit*

bernuansa dengan Iran, saingan besar Arab Saudi. Pesan untuk para pemimpin Qatar itu sederhana, “ Jatuh atau kita akan menguburmu.” Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab berharap bisa memaksa Emir Qatar Tamim bin Hamad untuk meninggalkan kemerdekaan kebijakan luar negerinya atau untuk menciptakan kondisi untuk sebuah kudeta di dalam negeri untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.³³ CEO *Qatar Airways* Akbar al-Baker mengakui bahwa pendapatan maskapai penerbangan dalam tiga bulan pertama tahun ini 6 (enam) persen di bawah ekspektasi karena situasi politik di kawasan ini. Terutama lalu lintas di kawasan ini telah dipengaruhi, karena maskapai penerbangan terpaksa membatalkan layanan ke Tunisia, Libya, Mesir, Suriah atau Bahrain, namun tidak sampai ke pasar jarak jauh yang menghubungkan.³⁴ Mills mengatakan bahwa, “ini tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi industri minyak dan gas yang terbiasa bekerja di bawah iklim politik dan perlindungan yang lebih ketat.” Blokade ini jelas berdampak negatif pada ekonomi Qatar pada umumnya namun belum secara langsung mempengaruhi industri minyak dan gas bumi namun hal tersebut tidak akan terjadi, perusahaan minyak dan gas seperti saat ini berdiri, akan dapat mengatasi hal tersebut baik dalam hal pembatasan.³⁵ Kesepakatan OPEC mengenai produksi minyak terus berlanjut sehingga tidak ada dampak yang sangat kecil, Kenaikan tersebut

³³ Bremmer, Ian, *The Qatar Rift Is the Middle East's 'Trump Effect' In Action*, *op, cit*

³⁴ Flottau, Jens, *Fueling Growth*, www.ebscohost.com, diakses pada hari Kamis, 20 September 2017 Pukul 20 : 00

³⁵ *Gas Announcement Is Political, Blockades*, *op, cit*

pada akhirnya memberi Qatar kapasitas untuk memproduksi 100 (seratus) juta ton gas alam cair per tahun, naik dari 77 (tujuh puluh tujuh) juta ton. Presiden dan CEO QP Saad Sherida al-Kaabi mengatakan bahwa “peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara online pada tahun 2022 sampai tahun 2024.” Al-Kaabi mengatakan bahwa rencana pembangunan QP tidak terpengaruh oleh apa yang dia sebut "blokade" oleh kuartet Arab, dan tidak ada perubahan di tingkat komunikasi dengan Iran atas lapangan gas bersama mereka. Qatar tidak memiliki rencana saat ini untuk berhenti mengekspor gas ke Uni Emirat Arab.³⁶ Qatar berdiri kokoh. Salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia, negara ini kecil dan kaya, dengan jumlah warga yang lebih sedikit daripada kota Tulsa, Okla, yang juga merupakan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah, lokasi utama untuk meluncurkan udara serangan terhadap ISIS dan al-Qaeda. Pemerintah dan bisnis negara tersebut dengan cepat menemukan cara untuk menghindari blokade tersebut, menetapkan rute pelayaran alternatif dan terbang dalam ternak. Rak-rak supermarket yang dikosongkan setelah embargo awal dimasukkan kembali dalam beberapa hari. Setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memberlakukan sanksi berat di Qatar pada 5 (lima) Juni, sebuah perusahaan Qatar meluncurkan pengangkutan ratusan sapi untuk melindungi persediaan susu, karena embargo memotong impor susu. John Joseph Dore “ mengenstruksikan bahwa negaranya membutuhkan sapi.”, seorang Irlandia berusia 57 (lima

³⁶ *Ibid*

puluh tujuh) tahun dan CEO Baladna, peternakan tempat sapi sekarang tinggal dengan mengenakan topi jerami dan kemeja biru langit, kemudian mengatakan bahwa, “ada rencana untuk mengimpor 14.000 ekor sapi perah lagi dari Wisconsin dan California pada tahun 2018.” Yang tidak dapat dilakukan tetapi hal tersebut dilaksanakan. Kepala Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar menyeruh kepada pengamat internasional untuk melakukan kunjungan kepada negara - negara yang telah melakukan blokade terhadap Qatar atas pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan yang dinilai mempunyai dampak negatif terhadap kemanusiaan.

5. Upaya Qatar untuk mengakhiri sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab

Qatar terus menyerukan dialog meskipun ada pemisahan 12.000 keluarga, meskipun pengepungan tersebut merupakan agresi yang jelas dan penghinaan terhadap semua perjanjian internasional, badan-badan , dan yurisdiksi. Melihat ke depan, kita harus mengeluarkan semua masalah yang sah dan mendiskusikan klaim dan tuduhan dengan mengajukan bukti dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Qatar siap untuk terlibat dalam proses negosiasi dengan kerangka kerja yang jelas dan serangkaian prinsip yang menjamin bahwa kedaulatan kita tidak dilanggar.³⁷ Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan dalam komentar publik pertamanya mengenai perselisihan tersebut pada Jumat malam bahwa, “Qatar siap untuk

³⁷ *Ibid*

melakukan dialog, namun setiap resolusi terhadap krisis harus menghormati kedaulatannya dan bahwa setiap persyaratan tidak dapat didikte dari luar. Dia juga mengulangi komitmen negaranya untuk memerangi terorisme. Kuartet anti-Qatar telah menunjukkan sedikit tanda dukungan.”³⁸ Pemerintah Qatar mengatakan negaranya akan terus berupaya mencari solusi." Kami berharap bahwa pada gilirannya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain merespon dengan mengambil langkah - langkah untuk mencabut embargo.”³⁹ Sheikh Saif bin Ahmed al Thani, juru bicara pemerintah Qatar, mengatakan "negara - negara yang memblokade mencari jalan keluar dari hal ini. Mereka harus menegosiasikan kesepakatan yang mengakhiri krisis tanpa memermalukan diri mereka sendiri.” Akan tetap menurut *versi Gulf of the Cold War*, “Kebuntutan hubungan diplomatik ini sudah lama datang dan tidak akan terselesaikan dengan cepat.”⁴⁰ Qatar dibantu oleh beberapa negara untuk mengakhiri krisis yang dialami, untuk mengakhir krisis hubungan diplomatik dengan negara tetangganya, Presiden Turkey Recep Tayyip Erdogan beberapa kali mengunjungi negara Teluk untuk membahas krisis yang terjadi yang sebelumnya telah sepakat dengan Emir Qatar bahwa tidak akan tunduk dengan tuntutan yang diberikan oleh negara tetangganya karena hal tersebut telah melanggar kedaulatan negaranya dan hukum internasional, sedangkan Kuwait mengusahakan untuk dilakukannya proses Mediasi akan tetapi tidak

³⁸ Al-Qatari, Hussain Schreck, Adam, *op,cit,hlm 13*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

membuahkan hasil, negara - negara teluk yang memutuskan hubungan diplomatik terhadap Qatar untuk memenuhi permintaan atau tuntutan yang telah diajukan.⁴¹ Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah Al-khaled Al-hamad Al-sabah mengunjungi Qatar dan berdialog Shekh Tamim bin Hamad membahas penyelesaian krisis Teluk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali melakukan pembicaraan melalui saluran telepon kepada Raja Salman untuk mengakhiri permasalahan dengan Qatar yang sebelumnya menuduh bahwa Qatar mendukung Terorisme dan Menteri Luar Negeri Iran mengunjungi Doha untuk membahas krisis yang dialami setelah Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memberlakukan sanksi pemutusan hubungan diplomatik serta Prancis mengancam keempat negara untuk mencabut embargo yang dilakukan terhadap Qatar. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin pentingnya melakukan diplomasi politik untuk mengatasi suatu permasalahan yang dialami oleh Qatar atas blokade negara tetangganya serta meminimalisir perbedaan - perbedaan pendapat, dukunganpun datang dari Uni Afrika agar krisis tersebut agar segera diselesaikan.⁴²

⁴¹ [Http://Internasional.Republika.Co.Id/Berita/Internasional/Timur-Tengah/17/07/25/Otmu8i377-Upaya-Erdogan-Mediasi-Krisis-Qatar-Tak-Ada-Kemajuan](http://Internasional.Republika.Co.Id/Berita/Internasional/Timur-Tengah/17/07/25/Otmu8i377-Upaya-Erdogan-Mediasi-Krisis-Qatar-Tak-Ada-Kemajuan) diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB

⁴² [Https://Arrahmahnews.Com/Category/Internasional/](https://Arrahmahnews.Com/Category/Internasional/) diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB